

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Semarang

Halaman 1 dan 7

Tidak Sesuai RAB, Tidak akan Dibayar

Dugaan Pemotongan Dana Bedah Rumah

SEMARANG - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang tidak akan melakukan pembayaran terhadap kontraktor proyek rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tidak sesuai ketentuan. Pernyataan tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperkim Kota Semarang, Ali, menyikapi adanya dugaan pemotongan dana rehab RTLH.

"Ketika muncul berita itu (Dana Bedah Rumah Disurat di *Jawa Pos Radar Semarang*), saya langsung turun ke lapangan untuk mengecek langsung masyarakat yang menerima bantuan. Apakah benar ada pemotongan dana," kata Ali, Sabtu (8/12).

Menurut Ali, dari hasil pengamatan di lapangan, proyek RTLH masih berjalan. Belum selesai. Artinya belum

bisa dikatakan apakah penyerapan anggarannya hanya Rp 7 juta dari bantuan sebesar Rp 15 juta. "Setelah saya cek, ternyata masih ada pekerjaan. Jadi memang belum diopname," terang Ali.

Setiap pelaksanaan proyek, pihaknya juga menerjunkan konsultan pengawas untuk melihat hasil pekerjaan. "Ketika pekerjaan sudah selesai nanti kita opname bersama. Disaksikan pihak masyarakat maupun kelurahan. Saya tidak mau pekerjaan itu (rehab RTLH) ada sunat-sunatan. Dari dinas pun tidak bisa seperti itu, karena itu uang masyarakat," tegas Ali.

Terkait anggaran rehab per rumah, Ali menyebut alokasinya memang Rp 15 juta. Dana tersebut terpotong biaya tenaga Rp 2,5 juta dan Rp 12,5 untuk material. "Anggaran material pun di dalamnya ada PPN dan PPh. Kalau plus pajak itu sekitar Rp 11 jutaan. Kalau Rp 7 juta itu dapat apa?" ujarnya. ▶ Baca *Tidak ...* hal 7

Sambungan dari hal.1

Disinggung mengenai masalah subkontraator hingga ditangani tangan ketiga, pihaknya mengaku tidak tahu. Yang jelas pihaknya akan menerima hasil pekerjaan sesuai RAB yang telah disepakati dengan kontraktor yang telah ditunjuk. "Masalah sub-suban saya tidak mau tahu. Saya hanya tunjuk satu orang (kontraktor). Yang jelas material yang dipasang harus sesuai RAB," ujarnya.

Pihaknya pun akan bertindak tegas jika ada penyimpangan

atau pemotongan anggaran rehab RTLH. Salah satunya tidak akan membayar kontraktor tersebut. "Saya tidak akan menerima dan tidak akan saya bayar kalau hasil opname nilai rehab jauh di bawah RAB. Saat penagihan harus ada berita acara dan persetujuan dari penerima bantuan. Kalau tidak ada berita acara (sesuai RAB) saya tidak akan bayar," tegasnya.

"Saya juga berpesan kepada masyarakat penerima, jangan sampai ada tekanan dari pihak mana pun. Dari siapa pun. Kalau dipaksa untuk menerima itu

(hasil pekerjaan tak sesuai), laporkan saja kepada dinas," tandasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekda Kota Semarang, Agus Riyanto, meminta dinas teknis untuk bertindak tegas terhadap bentuk penyelewengan yang dilakukan pihak kontraktor. "Kalau memang hasilnya tidak sesuai dengan spek atau jauh dari dana bantuan, saya minta jangan diterima (hasil proyek) dan *black list* saja kontraktornya. Karena ini menyangkut program pemkot untuk mensejahterakan masyarakat," ujarnya. (zal/ton)